

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi Daerah memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah di era reformasi dengan didukung undang – gundang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam upaya menggali potensi daerah.

Selama ini perencanaan dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah lebih banyak aturannya sama seluruh daerah dari Pemerintah Pusat dengan pola perencanaan Top Down Mechansm, sementara saat ini program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat haruslah dikurangi seiring dengan berlakunya Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Oleh sebab itu, implementasi Undang-Undang tersebut menuntut Pemerintah Daerah agar lebih mandiri dibidang keuangan karena belanja langsung dan tidak langsung saat ini atau yang lebih dikenal dengan belanja rutin dan pembangunan mendatang haruslah lebih banyak berasal dari Pajak dan Retribusi. Potensi

Pajak dan Retribusi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi sektoral dan sistem serta kemampuan aparaturnya pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pajak dan retribusi potensial yang dapat dijadikan sebagai basis utama Pendapatan Asli Daerah. Pembangunan Otonomi Daerah juga memberikan kesempatan yang luas kepada Daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkannya sumber-sumber pembiayaan yang disebut pendapatan atau penerimaan daerah. Pendapatan daerah itu sendiri terdiri; Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan pusat dan daerah, dana alokasi umum dan khusus, pinjaman daerah, dan pendapatan lain – lain yang sah. Hasil dari penerimaan atau pendapatan daerah inilah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang cukup potensial yang mempunyai proporsi cukup besar yang diperoleh pemerintah daerah, Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu terdiri atas: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan aset usaha dan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya daerah serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik sehingga pada

gilirannya otonomi daerah tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta memenuhi aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah berkaitan dengan penguasaan atas sumber-sumber keuangan Negara.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu tujuan utama implementasi otonomi daerah itu sendiri adalah bagaimana upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) memerlukan dukungan keuangan yang cukup memenuhi. Namun agar keuangan daerah tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat, maka daerah / kota menjadi sasaran dari limpahan sebagian wewenang Pemerintah Pusat termasuk kewenangan dalam hal menggali sumber-sumber keuangan dan menarik investasi sesuai potensi daerah.

Kabupaten Sampang sendiri berada di peringkat Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota dan Kota Sampang berada di nomor tiga puluh tiga se Kabupaten / Kota di Jawa Timur. Sedangkan untuk wilayah Madura, Kabupaten sampang masih dibawah Kabupaten Sumenep, Bangkalan dan Pamekasan dalam meningkatkan potensi Pendapataan Asli Daerahnya. Berikut daftar

Kabupaten/Kota se Jawa Timur berdasarkan Jumlah Pendapatan Asli Daerahnya
Sendiri.

**Tabel 1.1 Ranking Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Jawa Timur Tahun
2008-2012 (Dalam Jutaan Rupiah)**

Kabupaten/Kota	PAD					Rata-rata PAD	Rank
	2008	2009	2010	2011	2012		
Jawa Timur	3584133	3886986	5143999	7615043	9068160	5859664	-
Kota Surabaya	642765	864083	1036167	2139167	2353325	1407101	1
Kab. Sidoarjo	187467	252593	288732	393766	597756	344062,8	2
Kab. Gresik	126920	135683	160961	231698	325315	196115,4	3
Kab. Jember	91915	108808	146453	180266	211618	147812	4
Kab. Malang	85620	103389	124389	126027	154285	118742	5
Kota Malang	78620	86501	101519	158447	175985	120214,4	6
Kab. Tuban	66622	75546	73740	92130	119900	85587,6	7
Kota Kediri	66050	73445	77667	88275	101474	81382,2	8
Kab. Jombang	63917	79558	100571	105048	117508	93320,4	9
Kab. Pasuruan	60924	72300	87686	125427	152010	99669,4	10
Kab. Kediri	54613	50676	62318	59636	83052	62059	11
Kab. Lamongan	54555	66156	94066	103336	108606	85343,8	12
Kab. Banyuwangi	53813	63009	78153	91306	119657	81187,6	13
Kab. Lumajang	50000	58079	66052	76101	87054	67457,2	14
Kab. Bojonegoro	48923	59079	73200	93164	135697	82012,6	15
Kab. Nganjuk	48294	61381	71846	86404	98689	73322,8	16
Kab. Tulungagung	45208	55657	70955	86404	110503	73745,4	17
Kab. Blitar	43951	51044	61999	66516	77036	60109,2	18
Kab. Mojokerto	40504	50332	62870	78828	107074	67921,6	19
Kab. Sumenep	38209	38332	37940	47385	69787	46330,6	20
Kab. Magetan	34557	38248	45000	55262	61157	46844,8	21
Kab. Ponorogo	33389	41582	49777	52712	77382	50968,4	22
Kab. Probolinggo	32489	36110	37294	47796	70908	44919,4	23
Kab. Bondowoso	31064	30356	46483	50556	57780	43247,8	24
Kab. Bangkalan	30376	32236	35356	44017	62836	40964,2	25
Kota Probolinggo	30247	36087	40071	56619	60446	44694	26
Kota Blitar	28692	32802	40838	49118	54987	41287,4	27
Kab. Pamekasan	27555	33426	38147	45687	56161	40195,2	28
Kab. Trenggalek	26688	34254	50622	61066	67278	47981,6	29
Kab. Madiun	26268	32754	35958	49802	57699	40496,2	30
Kab. Situbondo	21993	32081	36440	50801	57030	39669	31
Kab. Sampang	20210	30460	35120	40506	52287	35716,6	32
Kab. Pacitan	20866	26221	25217	34384	44997	30337	33
Kab. Ngawi	20068	19233	26562	35314	51643	30564	34
Kota Madiun	18506	23413	28146	38038	46554	30931,4	35
Kota Pasuruan	18486	25617	34614	30532	33207	28491,2	36
Kota Batu	18104	22518	30000	30000	31494	26423,2	37
Kota Mojokerto	17455	21081	29519	34633	48056	30148,8	38

sumber: APBD se-Kabupaten/Kota di Indonesia, 2008-2012

Kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur yang saat ini menyumbang devisa dari Migas sangat menggantungkan harapan dari kompensasi bagi hasil perimbangan pusat dan daerah. Tentunya hal ini bertolak belakang dengan adanya otonomi daerah yang mampu membuat suatu daerah mandiri. Sejalan dengan pendapat Kaho (1995 : 123) bahwa kriteria penting untuk mengukur kemampuan suatu daerah adalah kemampuan simpanan pendukung dalam bidang keuangan. Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan pembukuannya.

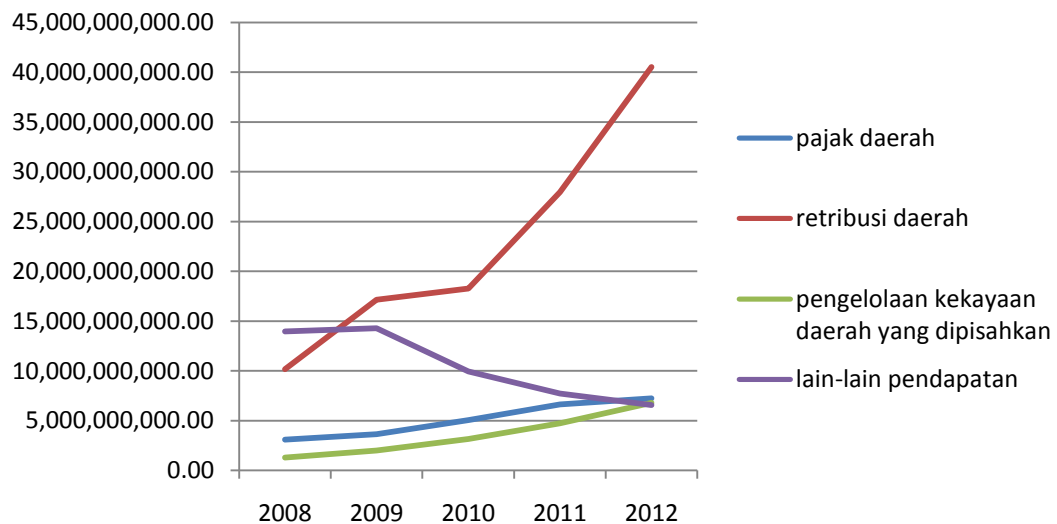
Bagi Kabupaten Sampang itu sendiri saat ini sangat didukung oleh perkembangan Madura yang semakin maju dengan adanya Suramadu, apalagi Kabupaten Sampang membutuhkan dana pembangunan yang cukup besar untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk itu langkah yang paling terpenting dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya terdiri dari unsur-unsur hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah yang di terima Kabupaten Sampang untuk tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2008 – 2012 (Dalam Rupiah)

Jenis penerimaan	Tahun Anggaran				
	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pajak Daerah	3.079.469.026,00	3.637.540.618,00	5.055.708.343,00	6.628.833.412,97	7.229.609.140,84
2. Retribusi Daerah	10.151.748.432,50	17.116.750.710,50	18.244.618.791,46	27.927.829.665,91	40.508.080.846,00
3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	1.279.769.917,14	1.987.880.234,97	3.152.172.678,04	4.709.039.222,34	6.778.438.502,56
4. Lain-Lain Pendapatan	13.965.331.353,23	14.284.064.377,66	9.943.842.668,00	7.708.272.330,94	6.549.228.755,67
Jumlah PAD	28.476.318.728,87	37.026.235.941,13	36.396.342.480,50	46.973.974.632,16	61.065.357.245,07

Sumber : Dispenda Kabupaten Sampang, 2008-2012

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Daerah Kabupaten Sampang tahun 2008-2012



Sumber : Dispenda Kabupaten Sampang, 2008-2012

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sampang, Jumlah terbesar yang di terima adalah dari retribusi daerah. Sedangkan penerimaan dari pajak daerah masih relatif kecil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada sisi lain berjalannya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan Daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan penetapan kebijakan hukum berupa Perda. Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah,

sedangkan Retribusi Daerah Menurut Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Alasan untuk pemilihan tempat penelitian ini, karena jika dicermati dari data yang ada, maka PAD Kabupaten Sampang menempati ranking 32 atau ranking 7 terbawah. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti mengapa PAD kabupaten Sampang tergolong rendah. Di mana komponen pendukung PAD antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah. Dari keempat komponen pembentuk PAD yang memiliki trend positif adalah pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan pembahasan pada pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen yang potensial yang terus dikembangkan dan ditingkat lagi penerimaannya, serta perhatian pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan harus sesuai dengan pungutan yang sebenar-benarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan untuk peningkatan pendapatan daerah, maka kiranya perlu dianalisis potensi ekonomi (kontribusi) dari masing-masing sektor. Sehingga pada akhirnya dapat menyusun perencanaan pembangunan di daerah secara efektif dan efisien sebagai modal pembangunan dalam mewujudkan otonomi daerah. berdasarkan uraian di atas tersebut penulisan tertarik untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan penerimaan keuangan daerah tiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Oleh karena itu, skripsi ini secara lengkap di tulis

dengan judul : “ANALISIS PERAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DI KABUPATEN SAMPANG 2008 – 2012 ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kondisi di atas, maka permasalahan yang perlu diidentifikasi jawabannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan dan kontribusi masing-masing pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan aspek pertumbuhan dan kontribusinya?
2. Bagaimana Keterkaitan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah uraian diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat pertumbuhan dan kontribusi masing-masing pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan aspek pertumbuhan dan kontribusinya.
2. Mengetahui perkembangan Indeks Kemandirian Keuangan (IKK) di Daerah Kabupaten Sampang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, antara lain :

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama kepada Pemerintah Kabupaten Sampang dalam upaya mengoptimalkan anggaran dan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perencanaan dan kebijakan keuangan daerah, khususnya perpajakan dan retribusi daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.